

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan pada daerah agar lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki sebuah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut maka memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan semua kewajiban sebagai pemerintah daerah, mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki daerah dengan membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal. Tetapi, perlu adanya pendukung kemampuan dari keuangan yang harus memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan

daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan untuk menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang bisa berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang

menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Perkembangan tersebut didasari oleh adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini mempunyai peran untuk menentukan nasib pemerintah daerah karena daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat keutuhan aset daerah terjaga.

Dasar yang digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi dalam penelitian ini adalah, dengan cara mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti Mochammad Faishal Hakim (2018) yang meneliti tentang Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. Persamaan antara penelitian sebelum dan penelitian ini adalah, sama-sama meneliti untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan daerah dan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah selama satu periode.

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2020-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mappi tahun 2020-2022 berdasarkan perhitungan rasio dan analisis yang terdiri dari analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, analisis efisiensi belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Mappi agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.
2. Bagi pihak investor dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten Mappi dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.
3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika

Pembahasan Skripsi ini dibagi dalam tiga bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang akan di rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kerangka teoritis dan penggambaran teori yang melandasi penelitian mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Mappi meliputi : kinerja, kinerja keuangan, kinerja keuangan pemda, sejarah APBD, dan kinerja APBD.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai obyek penelitian, variable penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan tentang deskripsi data hasil penelitian dimana akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian dan pembahasan instrumen penelitian, selanjutnya diuraikan mengenai pengujian persyaratan pengolahan data, serta diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian. Mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang mungkin dapat diantisipasi oleh peneliti selanjutnya dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.